

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pelindungan hukum Calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas pasca berlakunya Perda Nomor 2 Tahun 2015

Sesuai ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelindungan TKI Kabupaten Banyumas, bahwa yang berkewajiban memberikan pelindungan terhadap Calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas yaitu selain Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas juga menjadi kewajiban bagi pihak swasta dalam hal ini adalah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Bentuk pelindungan Calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas yang telah dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas meliputi pelindungan pada masa pra penempatan dengan pendaftaran dan seleksi Calon TKI Kabupaten Banyumas yang ketat dan mengenai proses penyelesaian masalah Calon TKI/TKI yang berada di dalam negeri. Sedangkan bentuk pelindungan hukum yang diberikan oleh PPTKIS ASAMULIA INDO kepada Calon TKI/TKI kabupaten Banyumas meliputi pelindungan asuransi pra penempatan, pendidikan dan pelatihan, seleksi, medical check up, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan pengawasan. Bentuk-bentuk pelindungan tersebut, telah memenuhi rumusan pasal yang ada di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2015

terkait dengan pelindungan pra penempatan. Pelindungan TKI tersebut termasuk pelindungan hukum yang bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan/sengketa dan pelindungan hukum yang bersifat represif yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa. Di Kabupaten Banyumas, Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Pelindungan TKI merupakan kebijakan yang strategis untuk meningkatkan pelindungan hukum bagi calon TKI. Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2015 juga dapat menggeser perspektif pelindungan, dari pelindungan yang berorientasi pada penanganan kasus TKI di luar negeri ke pelindungan yang lebih berorientasi pada pencegahan/pengurangan terjadinya kasus dan dengan adanya Perda juga diharapkan dapat mengurangi TKI ilegal yang ada.

2. a. Kendala yang dihadapi Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas meliputi:
 1. Faktor pendidikan TKI yang rendah
 2. PPTKIS yang tidak bertanggung jawab
 3. Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait
- b. Kendala yang dihadapi oleh PPTKIS ASAMULIA INDO meliputi:
 1. Masalah biaya mengenai pengurusan paspor Calon TKI
 2. Pengunduran diri Calon TKI yang akan diberangkatkan ke Negara penempatan.

Kendala-kendala yang demikian ini yang menghambat dalam melakukan pelindungan terhadap Calon TKI/TKI Kabupaten Banyumas sehingga menyebabkan pelindungan tersebut menjadi tidak optimal.

B. SARAN

Untuk meningkatkan pelindungan TKI di Kabupaten Banyumas maka perlu dilakukan:

1. Sosialisasi kepada PPTKIS maupun Calon TKI Kabupaten Banyumas mengenai peraturan-peraturan yang menjadi landasan pelindungan TKI serta pembinaan mengenai prosedur penyelesian permasalahan yang mungkin akan dialami oleh TKI.
2. Peningkatan koordinasi yang lebih konkret dan optimal antar lembaga terkait dalam upaya penanganan kasus/permasalahan TKI. Kerja sama semua pihak tentu sangat diperlukan agar permasalahan dapat terselesaikan, setidaknya ada upaya maksimal agar permasalahan TKI dapat berkurang. Selain itu dengan penguatan peran koordinasi, diharapkan berbagai permasalahan yang sering dihadapi TKI bisa lebih diantisipasi secara dini.

